

FORM E 81
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023
DINAS KOPERASI UKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PURWAKARTA

Kode	Perangkat Daerah/bidang urusan/ program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd Tahun 2022	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Pertriwulan					Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Keterangan		
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Realisasi				
2	17	001	PROGRAM PENURJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	A	B	80	90,21	23	44	68	81,9	81,9	B
2	17	001	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	7	4	5	6	7	7	100%	100%	
2	17	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	3	3	5	5	5	100%	100%	
2	17	001	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	
2	17	001	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	0	0	1	1	1	100%	100%	
2	17	001	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	
2	17	001	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	1	0	0	0	1	1	100%	100%	
2	17	001	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	
2	17	001	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	0	1	2	3	3	100%	100%	
2	17	001	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	3	3	3	3	3	3	100%	100%	
2	17	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	12	3	6	9	12	12	100%	100%	
2	17	001	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	
2	17	001	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	4	4	1	2	3	4	4	100%	100%	
2	17	001	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	

2	17	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	3	3	3	3	3	3	100%
2	17	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	1	1	1	1	1	100%
2	17	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	1	100%
2	17	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14	14	6	3	10	13	13	93%
2	17	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	2	1	3	4	4	100%
2	17	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5	6	2	2	4	5	5	100%
2	17	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinaannya	10	2	2	3	9	10	10	100%
2	17	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	4	2	2	3	4	4	100%
2	17	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	4	1	1	1	1	1	100%
2	17	003			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang diawasi	150	150	75	50	115	150	150	100%
2	17	3	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1	1	1	1	1	1	1	100%
2	17	003	2.01	001	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	150	150	75	50	115	150	150	100%

3	30	005	2.01	001	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	0	1	1	2	2	100%
3	30	005	2.01	001	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	50	0	0	0	50	50	100%
3	30	005	2.01	006	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	30	0	30	30	30	30	100%
3	30	006			PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KEHUSNAN	Standarisasi Produk Dalam Perlindungan Konsumen	80	20	40	60	80	80	100%
3	30	006	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	3000	841	1.170	2.403	4425	4425	148%
3	30	006	2.01	001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	3000	841	1.170	2.403	4.425	4425	148%
3	30	006	2.01	002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Jumlah Penunjang Operasional Penyuluhan Metrologi Legal	300	73	150	200	300	300	100%
3	30	007			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Terciptanya Penggunaan Produk dan Pemasaran Unggulan Kabupaten Puryakerta	2	0	0	2	2	2	100%
3	30	007	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1	0	0	1	1	1	100%
3	30	007	2.01	003	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	50	0	0	50	50	50	100%
3	31	002			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Pelatihan Potensi Unggulan	100	0	20	40	60	60	60%
3	31	002				Jumlah Desiminasi	100	0	0	74	74	74	74%
3	31	002				Jumlah Pelatihan Pengembangan Desain Kemasan	25	6	6	6	25	25	100%
3	31	002				Jumlah Perda	1	0	0	1	1	1	100%
3	31	002	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	4	0	0	4	4	4	100%
3	31	002	2.01	001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1	0	0	1	1	1	100%

3	31	002	2.01	003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2	1	0	0	0	0	2	2	100%	
3	31	002	2.01	004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	1	0	0	0	1	1	1	100%	
3	31	002	2.01	005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2	2	1	1	1	2	2	2	100%	
3	31	003			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Fasilitas Penerbitan IUI Kecil dan Mengengah Pemantauan dan Pengawasan Bagi IKM	10	30	10	10	10	10	10	10	100%	
					Fasilitas Penerbitan IUI Industri (IUI), Izin Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	30	80	30	30	30	30	30	30	100%	
3	31	003	2.01		Fasilitas Penerbitan IUI Kecil dan Mengengah Pemantauan dan Pengawasan Bagi IKM	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
3	34	003	2.01	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemantauan dan Pengawasan Realisasi Produksi terhadap IKM	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
3	31	004			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Pengembangan Diverifikasi Produk IKM	5	5	2	2	2	3	5	5	100%	
3	31	004	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	0	0	0	1	1	1	100%	
3	31	004	2.01	001	Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	0	0	0	0	1	1	1	100%	

3	31	004	2.01	002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINAS	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengikuti Diseminasi SIINAS	0	1	0	0	0	0	0	0%	
---	----	-----	------	-----	---	--	---	---	---	---	---	---	---	----	--

Purwokerto Desember 2023

